**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Tinjauan tentang Konsep Kesejahteraan Sosial**
     1. **Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan yang makmur, aman atau selamat, dan terbebas dari gangguan serta kesukaran, sedangkan sosial diartikan sebagai indikasi daripada kehidupan bersama makhluk manusia dan dalam hubungan antar manusia. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah keadaan orang yang hidup dengan aman, tentram, yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kondisi sejahtera biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial ( Bab 1 pasal 1 ayat 1), mendefinisikan Kesejahteraan sosial sebagai berikut : “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Kesejahteraan Sosial juga tidak dapat dilepaskan dari apa yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteran Sosial pasal 2 ayat 1 yakni, Kesejahteraan Sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Dari kedua pengertian Kesejahteraan Sosial di atas, peneliti melihat adanya kesamaan tujuan yaitu untuk meningkatkan taraf kehidupan yang layak bagi warga negaranya agar dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Adapun konsep kesejahteraan sosial yang dikemukakan Walter A. Friedlander (Fahrudin, 2012 : 9) yaitu:

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapaik standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Definisi di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem untuk membantu individu ataupun kelompok dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan sosialnya, serta mencapai kehidupan yang sejahtera, dengan mengembangkan potensi masyarakat untuk dapat memecahkan permasalahan sosial yang ada serta memenuhi segala kebutuhannya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa membatasi pengertian kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan-kepentingan keluarga dan masyarakat. Dari penjelasan di atas maka pengertian kesejahteraan sosial merujuk pada :

1. Kondisi statis atau keadaan sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial.
2. Kondisi dinamis yaitu suatu kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi statis di atas.
3. Institusi, arena atau bidang berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial atau pelayanan sosial.

Kesejahteraan sosial sebagaimana diuraikan dari beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kegiatan terorganisir dan dinamis yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk pencapaian standar kehidupan yang setinggi-tingginya bagi setiap lapisan masyarakat ditengah kehidupan bermasyarakat yang dikemas dalam pelayanan-pelayanan sosial atau usaha-usaha kesejahteraan sosial.

* + 1. **Tujuan Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan social memiliki tujuan yaitu untuk mencapai taraf yang diinginkan, yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan relasi – relasi social yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misilnya dengan menggali sumber – sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Menurut Schneiderman yang dikutip oleh Fahrudin (2012: 10) mengemukakan bahwa ada tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercemin dalam semua program kesejahteraan sosial, sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan definisi makna dan tujuan hidup, motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang maupun kelompok. Kegiatan sistem kesejahteraan sosial tersebut meilputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi anggota terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kesempatan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan.

1. Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegitan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu yang meliputi: mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masayrakat yang mempelihatkan penyimpangan tingkah laku misalnya kelompok kerja dan kelompok lain dalam masyarakat.

1. Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil, dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

Melihat dari uraian di atas maka tujuan kesejahteraan sosial merupakan pelakasanaan pada program-program kesejahteraan sosial, misalnya program-program pengembangan masyarakat, ketenagakerjaan, kesehatan, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anak yang semuanya bertujuan untuk mencapai sasaran pemeliharaan, kontrol dan perubahan yang membantu individu, kelompok, masyarakat dalam mencapai keadaan yang baik secara fisik, mental dan sosial agar terpenuhinya standar kehidupan pokok yang dibutuhkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.

* + 1. **Fungsi – Fungsi kesejahteraan Sosial**

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat agar terhindar dari masalah sosial baru. Adapun fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012: 12) sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan *(Preventive)*

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

1. Fungsi Penyembuhan *(Curative)*

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

1. Fungsi Pengembangan *(Development)*

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan

sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

1. Fungsi Penunjang *(Support)*

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.

* 1. **Tinjauan tentang Masalah Sosial**
     1. **Pengertian Masalah Sosial**

Kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi yang ideal dan menjadi dambaan setiap warga masyarakat. Oleh karena itu upaya-upaya dilakukan untuk menghilangkan atau minimal mengantisipasi factor-faktor yang menghalangi pencapaian kondisi ideal tersebut. Fenomena yang disebut sebagai masalah sosial tersebut dianggap sebagai kondisi yang dapat menghambat perwujudan suatu kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu masalah sosial seing disebut sebagai kondisiyang tidak diharapkan, dengan demikian kemunculannya selalu mendorong tindakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan.

Masalah sosial merupakan suatu fenomena yang mempunyai berbagai dimensi. Pada umumnya masalah sosial ditafsirkan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Adapun definisi dari masalah sosial menurut Horton dan Leslie yang dikutip oleh Suharto (2009: 152) menyatakan bahwa : “masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dirasakan banyak orang, tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diharapkan, dan perlu adanya upaya perubahan. Perubahan-perubahannya merupakan perubahan yang mengarah pada perubahan yang lebih baik tentunya.

Menurut Weinberg, dikutip oleh Soetomo (2013: 7) menjelaskan tentang pengertian masalah sosial sebagai berikut :

Masalah sosial merupakan situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, di mana merekasepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut.

Masalah sosial merupakan akibat dari interaksi sosial antara individu, individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Interaksi sosial berkisar pada ukuran nilai adat-istiadat, tradisi, dan ideologi, yang ditandai dengan suatu proses sosial yang disosiatif. Menurut Soekanto (2012: 312) menyatakan pengertian masalah sosial sebagai berikut :

Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan, yang memahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau, menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial.

Jadi sangat jelas adat istiadat mempunyai nilai pengontrol dan nilai sanksional terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Maka tingkah laku yang dianggap melanggar norma dan adat, atau berintegrasi dengan tingkah laku umum dapat dianggap sebagai masalah sosial. Sedangkan menurut Soetarso (2007) yang dikutip oleh Huraerah dalam buku Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat (2011: 4), perspektif profesi pekerjaan sosial adalah sebagai berikut :

Masalah sosial merupakan kondisi sosial yang *dinilai* orang sebagai kondisi yang tidak enak.Masalah atau tidaknya suatu kondisi sosial bergantung orang atau pihak yang memberikan penilaian. Suatu masalah sosial akan lebih sulit penanggulangannya kalau lebih banyak orang menilainya tidak sebagai masalah.

Dari definisi masalah sosial di atas dapat peneliti simpulkan, suatu kondisi sosial masyarakat dapat dianggap sebagai masalah apabila masyarakat tersebut menganggap kondisi itu sebagai masalah yang harus segera diselesaikan. Menurut Parrillo (1987: 14) yang dikutip Soetomo (2013: 6) yang menyatakan bahwa pengertian masalah sosial mengandung empat komponen, dengan demikian suatu situasi atau kondisi sosial apabila terlihat indikasi keberadaan empat unsur. Keempat komponen tersebut adalah :

1. Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Kondisi yang dinaggap sebagai masalah, tetapi dalam waktu singkat kemudian sudah hilang dengan sendirinya tidak termasuk masalah sosial.
2. Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau non-fisik, baik pada individu maupun masyarakat
3. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat
4. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Dari keempat komponen tersebut terdapat keterkaitan diantara satu dengan yang lain, yang pertama masalah sosial bertahan diwaktu tertentu, dirasakan banyak orang, menimbulkan kerugian, dan barulah membutuhkan solusi untuk memecahkan masalah sosial tersebut.

* + 1. **Klasifikasi Masalah Sosial**

Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber dari faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan. Setiap masyarakat mempunyai norma yang saling bersangkutan dengan kesejahteraan kesehatan fisik, kesehatan mental, serta penyesuaian diri individua atau kelompok sosial. Penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma tersebut merupakan gejala abnormal yang merupakan bentuk masalah sosial. Adapun klasifikasi masalah sosial berdasarkan sumber-sumbernya, yaitu :

* 1. Ekonomis
  2. Biologis
  3. Biopsikologis
  4. Kebudayaan

Klasifikasi yang berbeda mengadakan penggolongan atas dasar kepincangan-kepincangan dalam warisan fisik- biologis ,warisan sosial, dan kebijakan sosial. Klasifikasi ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada klasifikasi terdahulu.

* + 1. **Karakteristik Masalah Sosial**

Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan. Setiap masyarakat mempunyai norma yang bersangkut paut dengan kesejahteraan, kebendaan, kesehatan fisik, kesehatan mental, serta penyesuaian diri individu atau kelompok sosial.

Problema-problema yang berasal dari faktor ekonomis antara lain kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Penyakit misalnya bersumber pada faktor biologis, psikologis timbul seperti penyakit saraf, bunuh diri, disorganisasi jiwa dan seterusnya. Sedangkan persoalan yang menyangkut perceraian, kejahatan, konflik sosial, keagamaan dan kenakalan anak bersumber pada faktor kebudayaan. Dari hal tersebut maka masalah sosial memiliki berbagai karakteristik didalamnya. Karakteristik masalah sosial ialah sebagai berikut :

1. **Kondisi yang dirasakan banyak orang**

Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang.Namun demikian, tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut.Jika suatu masalah mendapatkan perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, masalah tersebut adalah masalah sosial. Peran media massa sangat menentukan apakah masalah tertentu menjadi pembicaraan khalayak umum. Jika sejumlah artikel atau berita yang membahas suatu masalah muncul di media massa, masalah tersebut akan segera menarik perhatian orang. Kasus kriminalitas akhir-akhir ini sangat ramai diberitakan dikoran maupun televisi.Kriminalitas adalah masalah sosial.

1. **Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan**

Menurut paham hedonisme, orang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak mengenakkan.Orang senantiasa menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan.Peran masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial.Suatu kondisi dapat dianggap sebagai maslaah sosial oleh masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainnya. Ukuran ‘baik’ atau ‘buruk’ sangat bergantung pada nilai atau norma yang dianut masyarakat. Penggunaan narkotika, minuman keras, homoseksual, bahkan bunuh diri adalah masalah sosial, apabila nilai atau norma masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk atau bertentangan dengan aturan-aturan umum.

1. **Kondisi yang menuntut pemecahan**

Suatu kondisi yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan. Bila seseorang merasa lapar akan segera dicarinya rumah makan. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasakan bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan.

1. **Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif**

Masalah sosial berbeda dengan masalah individual.Masalah individual dapat diatasi secara perorangan atau satu persatu.Tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial (*social engineering*) seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

* 1. **Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial**
     1. **Pengertian Pekerjaan Sosial**

Dalam menjalankan proses pemecahan masalah serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar individu, kelompok serta masyarakat, profesi pekerjaan sosial sangatlah berperan penting dalam pemecahan masalah sosial di atas tersebut. Profesi pekerjaan sosial *(social work profession)* merupakan suatu profesi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial manusia (masyarakat), meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan fungsionalitas sosialnya. Merujuk pada pengertian menurut Zastrow yang dikutip oleh Suharto (2009: 1), bahwa pengertian Pekerjaan Sosial adalah:

Aktivitas professional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi secara sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Definisi di atas menjelaskan bahwa pekerjaan sosial sebagai upaya seseorang dalam pemecahan masalah serta memberikan pertolongan dalam bentuk pelayanan sosial serta dituntut untuk dapat menumbuhkan kembali keberfungsian seseorang sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat, yang sering disebut dengan istilah pelayanan sosial.

Salah satu tugas yang selalu melekat dari pada profesi pekerjaan sosial adalah membantu individu, masyarakat dan kelompok dengan tujuan dapat memberikan bantuan inmaterial untuk manusia yang mengalami permasalahan yang berhubungan dengan peranannya dalam melakukan kegiatannya dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok keluargaMengacu pada Undang-Undang No.11 tahun 2009 yang dikutip oleh Suharto (2009: 154) pengertian dari Pekerja Sosial Profesional adalah:

Seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Menurut definisi diatas pekerja sosial merupakan seseorang yang bekerja di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki profesi kesejahteraan sosialdan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang memiliki pendidikan atau pengalaman untuk melakukan tugas pelayanan dan mengatasi masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pekerja sosial membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat tetapi juga memiliki profesi dibidang khusus pekerjaan sosial dan memiliki pendidikan dan pengalaman tenteang pekerjaan sosial.

Adapun pengertian dari pelayanan sosial menurut Huraerah (2011:45) sebagai berikut :

Pelayanan sosial merupakan kegiatan terorganisir yang ditunjukan untuk membantu warga Negara yang mengalami permasalahan sebagai akibat ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya. Kegiatan ini antara lain berupa pelayanan social bagi anak (termasuk balita dan remaja) serta usia lanjut terlantar atau mengalami kecacatan.

Sedangkan menurut Suharto (2009: 154) Pelayanan sosial adalah :

Aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial, serta dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individua tau kelompok yang mengalami hambatan dalam memahami kebutuhan hidupnya.

Tujuan pekerjaan sosial adalah mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pekerjaan social berusaha menolong individu, kelompok dan masyarakatagar mereka memahami secara tepat kondisi atau kenyataan yang mereka hadapi dan mencoba meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatasi permasalahan, serta dapat mengembalikan keberfungsian sosialnya.

* + 1. **Metode Pekerjaan Sosial**

Metode pekerjaan sosial adalah suatu prosedur kerja yang teratur dan dilaksanaka secara sistematis digunakan oleh pekerja social dalam memberikan pelayanan social. Dalam pekerjaan social ada beberapa metoe yang digunakan untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahnnya. Penangannya dari permasalahan individu, kelompok, dan masyarakat. Metode yang digunakan oleh peksos sebagai berikut:

1. **Bimbingan Sosial Perorangan *(Social Case Work)***

Bimbingan social perorangan menurut Swift yang dikutip oleh Mahudin (1992:11) adalah seni untuk membantu individu dalam mengembangkan dan menggunakan kemampuan pribadinya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di lingkungan sosialnya.

Berdasarkan definisi di atas metode ini diperuntukkan kepada seorang individu yang dalam kehidupannya mengalami masalah social. Seorang pekerja social harus bias menangani masalah yang didapat individu tersebut melalui pendekatan untuk mengembangkan dan memecahkan masalah individu tersebut. Dalam memecahkannya seorang peksos harus memiliki keahlian dan keterampilan dalam relasi pekerja social denga klien. Prinsip dasar pada bmbingan social dengan klien yaitu:

1. Penerimaan, seorang pekerja social harus mau menerima dan mengormati penerima pelayanan (klien) dalam setiap kondisi yang dialaminya.
2. Komunikasi, antara pekerja social dank lien harus saling memberi dan menerima informasi.
3. Individualisasi, pekerja social harus memahami, menerima bahwa klien sebagai pribadi yang unik, dalam arti berbeda antara individu yang satu dengan individu lainnya.
4. Partisipasi, pekerja social harus ikut serta secara langsung dalam membantu mengatasi permasalahan klien.
5. Kerahasiaan, pekerja social harus mampu merahasiakn informasi yang diberikan oleh klien.
6. Kesadaran diri, sebagai manusia pekerja social menyadari akan respon klien serta motivasi dan relasi bantuan professional.
7. **Bimbingan Sosial Kelompok *(Social Group Work)***

Bimbingan social kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuannya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi social, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok. Jadi bimbingan social kelompok digunakan untuk membantu individu dalam mengembangkan atau menyesuaikan diri dengan kelompok/lingkungan sosialnya dengan kondisi tertentu atau membantu kelompok mencapai tujuannya.

Individu-individu yang mempunyai permasalahan yang sama dibentuk menjadi kelompok. Pekerjaan social membimbing kelompok tersebut untuk mengembangkan interaksi satu sama lain sehingga terciptanya keselarasan kebutuhan yang ingin dipenuhi kelompok tersebut dalam pemecahan masalahnya. Prinsip dasar bimbingan social kelompok adalah:

1. Pemberian kelompok secara terencana. Kelompok merupakan satu kesatuan dimana individu memperoleh pelayanan untuk mengembangkan pribadinya. Kelompok yang telah terbentuk, maka badan social yang menerima kelompok dimaksud perlu memperhatikan factor-faktor yang erat hubungannya dengan situasi kelompok, terutama yang dapat memberikan kemungkinan untuk perkembangan individu menuju kearah positif dalam pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh kelompok.
2. Memiliki tujuan yang akan dicapai bersama. Didalam bimbingan kelompok tujuan, perkembangan individu dan kelompok harus dirumuskan dengan cermat oleh pembimbing kelompok agar terdapat keserasian antara harapan dan kemampuan kelompok.
3. Penciptaan interaksi terpimpin. Dalam bimbingan social kelompok harus dibina hubungan yang bertujuan antara pekerja social dengan anggota-anggota kelompok dan atas dasar keyakinan bahwa pekerjaan social akan menerima annggota kelompok sebagaimana adanya.
4. Pengambilan keputusan. Kelompok harus dibantu dalam mengambil keputusan-keputusan sendiri dan menentukan kegiatan yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya.
5. Organisasi bersifat fleksibel dalam arti organisasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Organisasi yang formal harus didorong bila sedang berusaha mencapai tujuan yang penting, yang dipahami oleh para anggotanya dan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya.
6. Penggalian sumber-sumber dan penyusunan program. Sumber yang ada di masyarakat harus dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman kelompok, untuk dimanfaatkan para anggota dan kelompok itu sendiri. Prnialaina kegiatan secara terus-menerus terhadap proses dan hasil program atau pekerjaan kelompok yang mementingkan jaminan dan peranggungjawaban terhadap apa yang diselesaikan masing-masing pihak untuk keseluruhan.
7. **Bimbingan Sosial Masyarakat**

Bimbingan social dengan masyarakat sebagai bsalah satu metode pekerjaan social yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat serta menekankan dengan adanya prinsip peran serta atau partisipasi masyarakat. Upaya tersebut cenderung mengarah pada pemenuhan kebutuhan bidang tertentu di masyarakat seperti kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anak dan lain sebagainya. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah:

1. Penyusunan program didasarkan kebutuhan nyata yang mendesak di masyarakat.
2. Partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat.
3. Bekerja sama dengan berbagai badan dalam rangka keberhasilan bersama dalam pelaksanaan program.
4. Titik berat program adalah upaya untuk pencegahan, rehabilitasi, pemulihan, pengembangan dan dukungan.
   * 1. **Intervensi Pekerjaan Sosial**

Kehadiran profesi pekerjaan social di tengah-tengah masyarakat tidak lain adalah bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian social individu kelompok, maupun masyarakat yang kemudian setiap kegiatannya difokuskan kepada hubungan social klien yang melakukan interaksi dengan dimana mereka hidup. Hal ini sejalan dengan pendapat Soetarso dalam Huraerah (2011: 39) yang mengemukakan bahwa:

Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi pemberian bantuan yang dilaksanakan melalui pengembangan interaksi timbal balik yang saling menguntungkan antara oran dan lingkungan sosialnya (perorangan, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat) untuk memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan orang tersebut sebagai suatu bkesatuan yang harmonis yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan social.

Pernyataan diatas menyatakan bahwa fokus intervensi pekerjaan social adalah pekerja social harus dapat memahami dari aspek masalah yang akan diteliti sehingga dapat memudahkan didalam menentukan pemecahan secara relefan.

* + 1. **Tahap Intervensi Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial pada dasarnya mempunyai tujuan dan kewajiban untuk membantu atau menolong individu, kelompok dan masyarakat untuk bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi sehingga mereka nantinya mampu mencari jalan sendiri. Proses intervensi pekerjaan sosial menurut Jusman Iskandar (2013: 65) adalah sebgai berikut :

1. Tahap Engagement Intake dan Kontrak

Merupakan tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien untuk bertukar informasi yang dibutuhkan, jenis pelayanan apa yang bisa diberikan untuk klien dalam pemecahan masalah, lalu akan terjadi saling mengenal dan kemudian terciptalah kontrak.

1. Tahap Assesment

Merupakan proses pengumpulan dan pemahaman masalah yang dihadapi klien yang meliputi bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, factor-faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah, koondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan hal itu semua maka dapatlah ditetapkan focus atau akar masalahnya.

1. Tahap Planning (Membuat perencanaan Intervensi)

Merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah tersebut, siapa sasaran serta bagaimana cara memecahkan masalah tersebut di masa mendatang.

1. Tahap Intervention (Pelaksanaan Program)

Tahap pelaksanaan pemecahan masalah, dalam pelaksanaan kegiatan ini klien diharapkan mengikuti proses pemecahan masalah secara aktif pada setiap tahapan.

1. Tahap Evaluasi

Pekerja sosial harus mengevaluasi kembali semua semua kegiatan pertolongan yang telah dilakukannya untuk melihat tingkat keberhasilannya, kegagalan atau hambatan-hambatan yang terjadi.

1. Tahap Terminasi (Pengakhiran/Pemutusan kegiatan pertolongan)

Merupakan tahap pengakhiran atau pemutusan kegiatan intervensi, hal ini dilakukan bilamana tujuan pertolongan telah dicapai atau terjadi kegiatan referral, ataupun bilamana karena ada alasan-alasan yang rasional klien meminta pengakhiran pertolongan, terdapat faktor-faktor eksternal yang dihadapi pekerja sosial atau Karena klien lebih baik dialihkan kepada lembaga-lembaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten.

* 1. **Tinjauan tentang Pelayanan Sosial**
     1. **Pengertian Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan sosial disebut juga sebagai pelayanan kesejahteraan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI 2001 : 646), pengertian pelayanan adalah 1. Perihal atau cara melayani 2.Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan mengharapkan imbalan (uang atau jasa) 3. Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan barang dan jasa. Dari pengertian tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa pelayanan itu merupakan suatu kegiatan yang diberikan seseorang atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Pelayanan sosial meliputi kegiatan-kegiatan atau intervensi-intervensi terhadap kasus yang muncul dan dilaksanaan secara individu, kelompok dan masyarakat serta memiliki tujuan untuk membantu individu, kelompok, dan lingkungan sosial dalam upaya mencapai penyesuaian dan keberfungsian yang baik dalam segala bidang kehidupan di masyarakat, yang terkandung dalam pelayanan dapat dikatakan adanya kegiatan-kegiatan yang memberikan jasa kepada klien dan membantu mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Pelayanan sosial itu sendiri merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

Pengertian lain tentang Pelayanan sosial dikemukakan oleh Huraerah (2011:45) sebagai berikut :

Pelayanan sosial merupakan kegiatan terorganisir yang ditunjukan untuk membantu warga Negara yang mengalami permasalahan sebagai akibat ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya. Kegiatan ini antara lain berupa pelayanan social bagi anak (termasuk balita dan remaja) serta usia lanjut terlantar atau mengalami kecacatan.

Dari definisi menurut Huraerah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan sosial yang diberikan terhadap warga negara, yang berupa pelayanan sosial terhadap anak, serta usia lanjut serta yang mengalami kecacatan sebagai akibat dari ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya serta dalam pemenuhan kebutuhan sosialnya.

Sedangkan menurut Suharto (2009: 154) menyatakan bahwa : “Pelayanan sosial merupakan aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial, serta dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memahami kebutuhan hidupnya.”

Melihat definisi diatas bahwa pelayanan sosial dijadikan sebagai program untuk dapat mengatasi berbagai hambatan individu maupun. Maka sangatlah jelas pelayanan social dibuktikan seiring modernisasi dewasa kini agar mampu membantu orang yang memiliki permasalahan sosial.

* + 1. **Fungsi Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial diklasifikasikan dalam berbagai cara, tergantung dari tujuan klasifikasi. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengemukakan fungsi pelayanan sosial sebagi berikut :

1. Peningkatan kondisi kehidupan masyarakat
2. Pengembangan sumber-sumber manusiawi
3. Orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuian sosial
4. Mobilisasi dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan
5. Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi.

Sedangkan menurut Alfred J. Khan dikutip oleh Soetarso (1999: 32-33) menyatakan bahwa fungsi utama pelayanan sosial adalah sebagai berikut:

* 1. Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan, dimaksudkan untuk mengadakan perubahan perubahan dalam diri anak dan pemuda melalui program program pemeliharaan, pendidikan (non formal) dan pengembangan. Tujuanya yaitu untuk menanamkan nilai nilai masyarakat dalam usah pengembangan kepribadian anak. Bentul-bentuk pelayanan sosial tersebut antara lain: Program penitipan anak, Program-program kegiatan remaja atau pemuda, Program-program pengisian waktu terluang bagi anak dan remaja dalam keluarga.
  2. Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan dan rehabilitasi, mempunyai tujuan untuk melaksanakan pertolongan kepada seseorang baik secara individu maupun didalam kelompok atau keluarga dan masyarakat agar mampu mengatasi masalah-masalahnya. Bentuk-bentuk pelayanan sosial tersebut antar lain: Bimbingan sosial bagi keluarga, Program asuhan keluarga dan adopsi anak, Program bimbingan bagi anak nakal dan bebas hukuman, Program-program rehabilitas bagi penderita cacat, Program-program bagi lanjut usia, Program-program penyembuhan bagi penderita gangguan mental dan Program-program bimbingan bagi anak-anak yang mengalami masalah dalam bidang Pendidikan.
  3. Pelayanan akses, kebutuhan akan program pelayanan sosial akses.

Dengan adanya berbagai kesenjangan tersebut, maka pelayanan sosial disini mempunyai fungsi sebagai akses untuk menciptakan hubungan bimbingan yang sehat antara berbagai program sehingga Program-program tersebut dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkannya. Pelayanan akses bukanlah semata-mata memberikan informasi tetapi juga termasuk menghubungkan seseorang dengan sumber-sumber yang diperlukan dengan melaksanakan program-program referral.

* + 1. **Tahapan Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial dalam prosesnya mengacu pada tahap-tahap pelayanan sosial seperti yang diungkapkan oleh Siporin yang dikutip Iskandar (1993:65) dalam buku Beberapa Keahlian Penting Dalam Pekerjaan Sosial, sebagai berikut :

1. Tahap Engagement, Intake dan Kontrak.

Tahap ini adalah tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang dapat diberikan oleh pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien. Dengan demikian terjadilah proses saling mengenal dan tumbuhnya kepercayaan klien kepada pekerja sosial. Pada akhirnya dapatlah dibuat suatu kontrak antara pekerja sosial dengan klien. Kontrak adalah kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien yang di dalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan-tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan-peranan dan harapan-harapan pekerja sosial dan klien, metode-metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan-pengaturan pertolongan lainnya.

1. Tahap Assesment

Assesment proses pengungkapan dan pemahaman masalah klien, yang meliputi : bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor-faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah yang terdahulu yang pernah dilakukan oleh klien, kondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan hal itu semua maka dapatlah ditetapkan fokus atau akar masalah klien. Dalam rangka assessment ini pekerja sosial dapat mempergunakan teknik-teknik wawancara, observasi dan teknik pengumpulan data lainnya yang dianggap tepat.

1. Tahap Membuat Perencanaan Intervensi

Rencana intervensi merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah tersebut, siapa sasarannya dan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut di masa mendatang. Rencana intervensi disusun dan dirumuskan haruslah berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan sebelumnya oleh pekerja sosial.

1. Tahap Melaksanakan Program

Berdasarkan rencana intervensi di atas maka selanjutnya pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien.Dalam pelaksanaan pemecahan masalah ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif pada setiap kegiatan.

1. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini pekerja sosial harus mengevaluasi kembali semua kegiatan pertolongan yang telah dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilannya, kegagalannya atau hambatan-hambatan yang terjadi. Ada dua aspek yang harus dievaluasi oleh klien, yaitu tujuan hasil dan tujuan proses.

1. Tahap Terminasi

Tahap terminasi dilakukan bilamana tujuan pertolongan telah dicapai atau bilamana terjadi kegiatan referral atau bilamana karena alasan-alasan yang rasional klien meminta pengakhiran pertolongan atau karena adanya faktor-faktor external yang dihadapi pekerja sosial atau karena klien lebih baik dialihkan ke lembaga-lemabaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten.

Pelaksanaan proses pelayanan sosial yang dilakukan oleh lembaga sosial melibatkan beberapa profesi tidak hanya pekerja sosial saja, pembagian kerja yang jelas akan mempermudah pelaksanaan pelayanan sosial sampai pada tujuan yang diharapkan.

* + 1. **Dasar-dasar Pelayanan Sosial**

Dalam Undang –undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yaitu organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraaan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

lembaga Kesejahteraan Sosial memiliki posisi strategis, karena memiliki tugas dan tanggung jawab mencakup 4 kategori, yaitu :

1. Bertugas dalam mencegah timbulnya permasalahan sosial penyandang dengan melakukan deteksi dan pencegahan sedini mungkin.
2. Bertugas melakukan rehabilitasi sosial untuk memulihkan rasa percaya diri, dan tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya, dan meningkatkan kemampuan kerja fisik dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kemandirian di masyarakat.
3. Memberikan pelayanan pemakanan sesuai dengan standar gaji pembinaan fisik, agama, psikologis, sosial dan pendidikan disekolah bagi anak sekolah usia sekolah, agar mampu berperan aktif di lingkungan masyarakat.
4. Bertugas untuk mengembalikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke masyarakat melalui penyiapan sosial, penyiapan masyarakat agar mengerti dan menerima kehadiran kembali dan membantu penyaluran ke berbagai sektor kerja dan usaha produktif.
5. Melakukan pengembangan individu dan keluarga, seperti mendorong peningkatan taraf hidup kesejahteraan pribadi, meningkatkan rasa tanggungjawab sosial untuk berpartisipasi aktif di tengah masyarakat, mendorong partispasi masyarakat untuk menciptakan iklim yang mendukung pemulihan dan memfasilitasi dukungan psiko-sosial dari keluarga.
   1. **Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat**
      1. **Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Secara konseptoal, pemberdayaan atau pemberkuasaan *(empowerment)* berasal dari kata *power* (kekuasaan atau pemberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dari konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : (a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) Menjangkau sumber-sumber produksi yang memungkinkan mereka dalam meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlikan; (c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan masyarakat menurut Persons, et.al (1994) dikutip oleh Suharto (2014: 58-59) menyatakan bahwa :

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaanmenekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup adil untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang ditujukan pada orang untuk dapat meningkatkan dirinya dalam aspek kehidupannya yang mencakup keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang adil dalam rangka mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Menurut Ife (1995: 61-64) Yng dikutip oleh Suharto (2014: 59), Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di dini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas :

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggsl, pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
3. Ide atau gagasan: kemampuan untuk mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, Pendidikan, kesehatan.
5. Sumber-sumber: kemampuan mobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang dan jasa.
7. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.
   * 1. **Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, pelaksanaan proses tersebut dan pencapaian tujuan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan yang secara rinci dikemukakan oleh Suharto (2014: 67-68) yaitu sebagai berikut:

1. Pemungkinan: Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan structural yang menghambat.
2. Penguatan: Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu manjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan bersama.
   * 1. **Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Pelaksanaan pendekatan di atas bertolak pada pedoman dan prinsip pekerjaan sosial. Menurut beberapa penulis seperti Solomon (1976), Rappaport (1984), Pinderhughes (1983), Swift (1984), Swift dan Levin (1987) terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial yang dikutip oleh Suharto (2014: 68-69) yaitu sebagai berikut:

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.
2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai actor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
3. Masyarakat harus melihat dari mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
4. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
5. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, haris beragam dan menghargai keberagaman yang berasaln dari factor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
6. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, Karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif; permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
11. Pembardayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.
    * 1. **Kelompok Lemah dan Ketidakberdayaan**

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik Karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun Karena kondisi eksternal (misalkan ditindas oles struktur sosial yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya adalah sebagai berikut:

* 1. Kelompok lemah secara structural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
  2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, serta masyarakat terasing.
  3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga.

Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta para penyandang cacat adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. Keadaan dan perilaku mereka yang berbeda dari keumuman, kerapkali dipandang sebagai penyimpangan *(deviant)*. Mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya kekurangadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.

* + 1. **Indikator Keberdayaan**

Menurut Kieffer (1981) yang dikutip Suharto (2014: 63) menjelaskan bahwa: “Pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif”. Suharto juga mengutip dari Person *et*.*al*.(1994: 106) tentang tiga dimendi pemberdayaan yang merujuk pada:

* 1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
  2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
  3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari Pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperolah kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Untuk dapat mengetahui focus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator-indikator keberdayaan yang dapat menunjukan seseorang itu berdaya ataukah tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis.

Adapun indikator pemberdayaan yang telah dirangkum dari tabel indikator keberdayaan menurut Suharto (2014: 65) meliputi:

* 1. Kebebasan mobilitas, yaitu kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tingglnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
  2. Kemampuan membeli komoditas kecil, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak gorang, bumbu); kebutuhan ditinya (minyak rambut,, sabun mandi rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli bareng-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
  3. Kemampuan membeli komoditas besar, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang skunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indicator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
  4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, yaitu mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri engenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian ternak, memperolah kredit usaha.
  5. Kebebasan relative dari dominasi keluarga, yaitu reponden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (istri, suami, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja di luar rumah.
  6. Kesadaran hokum dan politik, yaitu mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintahan desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hokum-hukum waris.
  7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, yaitu seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri.

Indikator-indikator di atas merupakan upaya daripada masyarakat untuk dapat mengakses keperluan-keperluannya, serta menimbulkan perubahan terhadap keadaan yang lebih baik yang berkaitan dengan perubahan sosial. Pembangunan masyarakat desa dan pelayanan sosial untuk memandirikan masyarakat seperti ini sebagai alat utama perubahan sosial. Menurut Horton dan Hunt (1990: 208) dikutip oleh Iskandar, Jusman (2011: 17) menjelaskan bahwa: “Perubahan sosial merupakan perubahan dalam segi struktur sosial dan hubungan sosial, yang mencakup perubahan distribusi kelompok usia, tingkat pendidikan rata-rata, serta kelahiran penduduk”.

Dengan demikian secara mendasar bahwa perubahan sosial berkaitan dengan bentuk sosial, struktur sosial serta proses sosial yang diantaranya meliputi bagaimana keseimbangannya dapat terwujud serta bagaimana pula perubahan-perubahan itu berlaku dalam masyarakat.

* + 1. **Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan**

Pemberdayaan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat. Keberdayaan kesehatan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan dalam bidang kesehatan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat serta inovatif, tentu memiliki keberdayaan tinggi.

Pemberdayaan di bidang kesehatan menurut Sulaeman (2012: 102) dikurip dari Departemen Kesehatan dan Unicef 1999 adalah :

Segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk secara mandiri dapat mengidentifikasi masalah, merencanakan dan mengambil keputusan untuk melakukan pemecahan masalah dengan benar dengan memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya, potensi dan sarana yang ada, tanpa atau dengan bantuan pihak lain.

Sementara itu, menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (2011), dikutip oleh Sulaiman (2012: 102) bahwa pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan meliputi :

(1) Upaya meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat secara sistematis untuk mengembangkan diri (2) Upaya meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam mencegah dan mengatasi masalah dengan kegiatan dari, oleh dan untuk masyarakat (3) Upaya fasilitasi non instruktif untuk : *(a)* Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kemampuan*, (b)* Identifikasi masalah, pengambilan keputusan, merencanakan, dan memecahkan masalah *(c)* Mengembangkan potensi masyarakat, dan kemitraan, *(d)* Mendorong kemandirian masyarakat.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan mengandung aspek: (1) Upaya *(effort)*, (2) Optimalisasi, (3) Potensi Masyarakat, (4) Menggali potensi masyarakat, (5) Kemitraan *(partnership)*, (6) Peningkatan, (7) Pertumbuhan *(growth)*, (8) Pembangunan *(development)*, (9) Pengembangan sumber daya manusia sukarela (kader), (10) Kemandirian, (11) Keberlanjutan *(sustainability)*.

Kegiatan-kegiatan pertolongan dalam memecahkan permasalahan kesehatan di atas bertujuan agar masyarakat dapat berubah dari yang tadinya kurang peduli menjadi peduli, dari yang tadinya tidak menjaga kedepannya semaki menjaga dan mengembangkan kelestariannya guna tercapainya keadaaan masyarakat yang peduli akan kesehatan.

* 1. **Tinjauan Tentang Kesehatan Lingkungan**
     1. **Pengertian Kesehatan Lingkungan**

Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks, yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatn itu sendiri. Demikian juga dengan pemecahan masalah kesehatan lingkungan, tidak hanya dilihat dari segi ksehatannya saja, tetapi harus dilihat dari segi yang ada pengaruhnya terhadap masalah kesehatan tersebut. Sehat didefinisikan oleh (Whole: 1977) dikutip oleh Sulaeman (2012: 25) sebagai berikut: “Sehat adalah keadaan di mana seseorang ketika diperiksa oleh ahlinya tidak mempunyai keluhan ataupun tidak terdapat tanda-tanda penyakit atau kelainan”.

Sehat itu sendiri merupakan keadaan yang dirasakan nyaman dengan tidak adanya keluhan-keluhan yang dirasakan dalam tubuh seseorang tentang penyakit atau kelainan yang menyangkut keadaan fisiknya, mental dan sosialnya. Ketika kita berada dalam keadaan sehat senantiasa terasa kenyamanan dalam diri. Sehat bukan hanya tentang penyakit yang terdapat dalam tubuh seseorang, lingkungan pun senantiasa haruslah terjaga dari kesehatan. Dengan keadaan lingkungan yang sehat akan menimbulkan kenyamanan bagi penghuninya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Pengertian kesehatan lingkungan itu sendiri dikemukakan oleh Notoatmodjo (2011: 169) yang menyatakan bahwa:

Kesehatan lingkungan pada hakikatnya adalah suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimal pula. Ruang lingkup kesehatan lingkungan tersebut antara lain mencakup: perumahan, pembuangan kotoran manusia (tinja), penyediaan air bersih, pembuangan sampah, pembuangan air kotor (air limbah) dan sebagainya.

Status kesehatan masyarakat sangatlah penting demi optimalnya kehidupan masyarakat dalam menjalani kesehariannya. Dengan kata lain apabila masyarakat telah menjalankan aktivitas yang mencerminkan kepeduliannya akan optimalnya kesehatan dan keadaan lingkungan, maka mereka telah menumbuhkan keadaan yang optimal pula dalam kesehatan lingkungan mereka sendiri.

* + 1. **Faktor yang mempengaruhi kesehatan danam Kesehatan Lingkungan**

Faktor yang mempengaruhi kesehatan, baik kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat, dalam hal ini Notoatmodjo menurut Hendrik L. Blum (1974) mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi kesehatan diantaranya Lingkungan, Perilaku, Pelayanan, Kesehatan, dan Hariditas (Keturunan). Keempat faktor tersebut disamping berpengaruh langsung terhadap kesehatan, juga saling berpengaruh satu sama lainnya. Status kesehatan akan tercapai secara optimal, bilamana keempat faktor tersebut secara bersama-sama mempunyai kondisi yang optimal. Salah satu faktor berada dalam keadaan yang terganggu (tak optimal), maka status kesehatan akan tergeser di bawah optimal.

* + 1. **Jenis Masalah Lingkungan**

Usaha dalam perbaikan keadaan lingkungan dan kesehatannya dilaksanakan dari masa ke masa, dan dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain, serta dari usaha yang paling sederhana (primitif) sampai pada usaha yang paling mutakhir (modern). Adapun jenis masalah lingkungan yang senantiasa membandel diantaranya mencakup permasalahan sebagai berikut:

1. Sanitasi (jamban)

Dengan semakin bertambahnya penduduk, masalah pembuangan kotoran manusia meningkat. Dilihat dari segi kesehatan lingkungan, masalah pembuangan kotoran manusia merupakan masalah yang pokok untuk sedini mungkin diatasi, karena kotoran manusia adalah sumber penyebaran berbagai macam penyakit. Di samping dapat mengkontaminasi makanan, minuman, sayuran, juga air dan tanah dengan perantara penyebaran seperti serangga (kecoa, lalat dan sebagainya) dan bagian-bagian tubuh kita dapat terkontaminasi oleh tinja tersebut. Proses penyebaran penyakit pun akan semakin cepat apabila kurangnya perhatian terhadap pengelolaan pembuangan tinja tersebut.

Menurut Notoatmodjo (2011: 184) menjelaskan bahwa: “Terdapat beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh tinja antara lain: tifus, kolera, serta bermacam-macam cacing (gelang, pita, kremi, tambang).

Untuk dapat mencegah sekurang-kurangnya mengurangi kontaminasi dari tinja terhadap lingkungan maka dalam pembuangan kotoran manusia haruslah dikelola dengan baik. Notoatmodjo (2011: 184) menjelaskan bahwa suatu jamban disebut sehat untuk daerah pedesaan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak mengotori pemukiman tanah di sekeliling jamban tersebut
2. Tidak mengotori air pemukiman di sekitarnya
3. Tidak mengotori air tanah di sekitarnya
4. Tidak terjangkau oleh serangga terutama lalat dan kecoa, dan binatang-binatang lainnya
5. Tidak menimbulkan bau
6. Mudah digunakan dan dipelihara (dirawat).
7. Sederhana desainnya
8. Murah
9. Dapat diterima oleh pemakainya.
10. Penyediaan air bersih

Air merupakan keubtuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Kebutuhan manusia akan air sangatlah kompleks antara lain untuk kebutuhan mandi, minum, memasak, mencuci dan lain sebagainya. Dengan demikian sumber penyediaan air harus baik agar air tersebut tidak menimbulkan penyakit bagi manusia dan lingkungannya.

1. Pembuangan dan pengelolaan sampah

Sampah merupakan benda ataupun sisa dari benda yang digunakan manusia yang sudah tidak terpakai lagi dan senantiasa menjadi permasalahan. Adapun pengertian sampah dikemukakan oleh Notoatmodjo (2011: 190) sebagai berikut: “Sampah adalah suatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang”.

Sampah erat kaitannya dengan kesehatan lingkungan, karena dari sampah tersebut akan hidup berbagai mikro organisme penyebab penyakit, dan juga binatang serangga sebagai penyebar penyakit tersebut. Oleh Karena itu, sampah harus dikelola dengan benar agar tidak mengganggu atau mengancam kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang baik bukan hanya untuk kepentingan kesehatan saja, tetapi juga untuk keindahan keindahan lingkungan. Pengelolaan sampah dilakukan agar sisa-sisa dari kebutuhan manusia tadi tidak menimbulkan masalah terutama masalah kesehatan lingkungan. Dengan demikian manusia dan lingkungannya dapat berdampingan dalam suasana yang nyaman dan juga sehat tentunya.

Cara-cara pengelolaaan sampah dalam hal ini dikemukan oleh Notoatmodjo (2011:193) diantaranya adalah:

1. Pengumpulan dan pengangkutan sampah

Pengumpulan sampah menjadi tanggung jawab dari masing-masing rumah tangga atau instansi yang menghasilkan sampah. Mereka harus membangun atau mengadakan tempat khusus untuk pengumpulan sampah, yang selanjutnya dapat dibuang ke tempat pembuangan akhir. Mekanismenya untuk daerah pedesaan pada umumnya dapat dikelola oleh masing-masing keluarga, tanpa memerlukan TPA. Sampah rumah tangga daerah pedesaan umumnya didaur ulang menjadi pupuk agar dapat berguna.

1. Pemusnahan dan pengolahan sampah

Pemusnahan atau pengolahan sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan cara-cara sebagai berikut:

* Ditanam *(landfill)*, yaitu pemusnahan dampah dengan membuat lubang di tanah kemudian sampah dimasukan dan ditimbun dalam tanah.
* Dibakar *(inceneration)*, yaitu memusnahkan sampah dengan membakarnya didalam tungku pembakaran.
* Dijadikan pupuk *(composting)*, yaitu pengelolaan sampah menjadi pupuk (kompos), khususnya untuk sampah organis daun-daunan, sisa makanan, dan sampah lain yang sensntiasa dapat membusuk. Apabila setiap keluarga dapat memisahkan atau memilah sampah sesuai jenisnya, organik dan non-organik, dengan menjadikan pupuk bagi sampah organic dan dapat mendaur ulang sampah yang sulit terurai menjadi sesuatu yang lebih berguna, maka masalah sampah akan sedikit berkurang.

1. Pembuangan air limbah (air kotor).

Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industry maupun tempat-tempat umum lainnya dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Pengertian mengenai air limbah dikemukakan oleh Haryoto Kusnoputranto (1989) yang dikutip Notoatmodjo (2011: 194) menjelaskan bahwa: “Air limbah adalah kombinasi dari cairan dan sampah cair yang berasal dari daerah pemukiman, perdagangan, perkantoran, dan industry, bersama-sama dengan air tanah, air pemukiman dan air hujan yang mungkin ada”.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa air buangan atau limbah merupakan air yang tersisa dari hasil kegiatan manusia, baik kegiatan rumah tangga maupun kegiatan lainnya seperti industry, perkantoran dan sebagainya. Meskipun disebut air sisa, namun ketika volumenya besar dan ini merupakan air limbah yang kotor ketika mengalir ke sungai dan selanjutnya mungkin akan digunakan lagi oleh manusia. Oleh karena itu, air limbah ini harus dikelola dengan baik. Adapun cara-cara pengolahan air limbah secara sederhana menurut Notoatmodjo (2011: 197) ialah sebagai berikut:

1. Pengenceran *(dilution)*, merupakan cara pengolahan air limbah dengan cara diencerkan sampai mencapai konsentrasi yang cukup rendah, kebudian dibuang ke badan-badan air.
2. Kolam Oksidasi *(oxidation ponds)*, ialah pengolahan air limbah dengan pemanfaatan sinar matahari, ganggang *(algae)*, bakteri dan oksigen dalam proses pembersihan alamiah. Air limbah dialirkan ke dalam kolam besar berbentuk segi empat dengan kedalaman antara 1-2 meter. Lokasi kolam haruslah jauh dari pemukiman, dan di daerah yang terbuka memungkinkan sirkulasi angina dengan baik.
3. Irigasi, ialah prsses pengolahan limbah dengan cara air limbah dialirkan ke dalam parit-parit terbuka yang digali, dan air akan merembes masuk ke dalam tanah melalui dasar dan dinding parit-parit tersebut. Dalam keadaan tertentu air buangan dapat digunakan untuk pengairan lading pertanian atau perkebunan dan sekaligus berfungsi untuk pemupukan. Hal ini terutama dapat dilakukan untuk air limbah dari rumah tangga, perusahaan, rumah potong hewan, dan lainnya di mana kandungan zat-zat organic dan protein cukup tinggi yang diperlukan oleh tanaman.
   1. **Tinjauan Tentang Desa Siaga Aktif**
      1. **Pengertian Desa Siaga Aktif**

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan pengembangan dari Desa Siaga yang telah dimulai dari tahun 2006. Desa Siaga Aktif adalah desa yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti Pusat Kesehatan Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya. Penduduknya mengembangkan UKBM dan melaksanakan kedaruratan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Pengertian Desa Siaga Aktif dikemukakan oleh Sulaiman (2012: 304) dikutip dari Kepmenkes RI no.564/Menkes/SK/VIII/2006 yang menyatakan bahwa:

Desa Siaga Aktif adalah suatu kondisi masyarakat desa/kelurahan yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.

Sulaiman juga (2012: 300) juga mengungkapkan bahwa Desa Siaga Aktip merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dengan tujuan agar masyarakat menjadi mandiri untuk memecahkan masalah-masalah kesehatan yang mereka hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar.

* + 1. **Tujuan dan Desa Siaga Aktif**

Adapun tujuan dari desa siaga aktif menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 564/Menkes/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemngembangan Desa Siaga Aktif dikutip oleh Sulaiman (2012: 305) terdiri dari dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum, yaitu: Terwujudnya masyarakat desa yang sehat, serta peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya.

Tujuan Khusus, yaitu: (a) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa akan pentingnya kesehatan; (b) Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan (bencana, wabah, kegawatdaruratan, dan sebagainya); (c) Meningkatkan keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat; (d) Meningkatkan kesehatan lingkungan; (e) Meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menolong diri sendiri di bidang kesehatan.

* + 1. **Sasaran Desa Siaga Aktif**

Untuk mempermudah intervensi pengembangan Desa Siaga Aktif, sasaran Desa Siaga Aktif dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis. Sulaiman (2012: 306) mengemukakan sasaran Desa Siaga Aktif yaitu sebagai berikut:

Semua individu dan dan keluarga di desa/kelurahan sebagai sasaran utama yang diharapkan mampu melaksanakan PHBS, serta peduli dan tanggap terhadap masalah kesehatan di wilayah desa; (b) Pihak-ihak yang mempunyai pengaruh terhadap perubaha perilaku individu dan keluarga atau dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perubahan perilaku tersebut. Seperti tokoh masyarakat formal dan informal (tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda), kader kesehatan, dan petugas kesehatan; (c) Pihak-pihak pemangku kepentingan *(stakeholder)* yang diharapkan memberikan dukungan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dana, tenaga, sarana dan lain-lain. Seperti kepala desa dan aparat pemerintahan desa, camat, para pejabat lintas sector terkait, lembaga sosial lemasyarakatan (PKK, BPK, LPMD dan lain-lain), dunia usaha/swasta, donator dan lain-lain.

* + 1. **Kebijakan dan Strategi Desa Siaga Aktif**

Kebijakan Desa Siaga Aktif adalah sebagai berikut :

1. Mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat desa, menyiapsiagakan masyarakat menghadapi masalah-masalah kesehatan, memandirikan perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Merekonstruksi atau membangun kembali berbagai UKBM
3. Melakukan revitalisasi PKMD sebagai pendekatan edukatif yang secara global telah diakui sebagai pendekatan yang tepat dalam mencapai kesehatan bagi semua yang diformulasikan sebagai visi Indonesia sehat.

Adapun strategi yang dilakukan dalam pengembangan Desa Siaga Aktif adalah sebagai berikut:

* 1. Advokasi, yaitu upaya untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari para pemangku kepentingan *(stakeholder)*. Dukungan dapat berupa kebijakan, penyediaan sumber daya seperti tenaga, dana, sarana dan sebagainya.
  2. Kemitraan *(partnership)* untuk memperoleh dukungan masyarakat *(social support)* yaitu upaya menciptakan opini atau lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat melakukan kegiatan dan program Desa Siaga Aktif. Dilakukan melalui pendekatan individu, kelompok, maupun masa.
  3. Gerakan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu proses membantu sasaran agar berubah menjadi tahu/sadar, mau dan mampu melaksanakan kegiatan dan program desa siaga. Dilakukan dengan pemberian informasi, maupun pengembangan/pengorganisasian masyarakat *(community organization)*.
     1. **Pendekatan Operasional Desa Siaga Aktif**

Pendekatan Desa Siaga Aktif dilaksanakan dengan membantu masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran melalui siklus pemecahan masalah yang terorganisasi (pengorganisasian masyarakat). Secara garis besar langkah-langkah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan pada desa siaga, terdiri atas enam tahap, yaitu sebagai berikut:

* 1. Pengembangan Tim Petugas Puskesmas: Tujuan langkah ini adalah mempersiapkan para petugas yang berada di wilayah Puskesmas, agar para petugas memahami tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat pada desa siaga aktif.
  2. Pengembangan tim di masyarakat: Tujuan langkah ini adalah untuk mempersiapkan kader, tokoh masyarakat, serta masyarakat agar mereka tahu dan mau bekerja sama dalam satu tim untuk mengembangkan Desa Siaga.
  3. Survei Mawas Diri (SMD) atau Telaah Mawas Diri (TMD) atau *Community Self Survey* (CSS) di masing-masing desa: Bertujuan agar pemuka masyarakat mampu melakukan telaah mawas diri untuk desanya. Survey ini dilakukan oleh pemuka-pemuka masyarakat dan kader Desa Siaga Aktif setempat dengan bimbingan tenaga kesehatan. Dengan demikian, diharapkan mereka menjadi sadar akan permasalahan yang dihadapinya di desanya, serta bangkit niat dan tekad untuk mencari solusinya, termasuk membangun Poskesdes sebagai upaya mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat desa.
  4. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD): Tujuan penyelenggaraan MMD di tiap desa adalah mencari alternative penyelesaian masalah kesehatan dan upaya membangun poskesdes, dikaitkan dengan potensi yang dimiliki desa, juga untuk menyusun rencana jangka panjang pengembangan Desa Siaga.
  5. Pelaksanakan Kegiatan: Secara operasional pembentukan Desa Siaga dilakukan melalui kegiatan: (1) Pemulihan pengurus dan kader desa siaga aktif yang dilakukan melalui pertemuan khusus para pemimpin formal desa dan tokoh masyarakat serta beberapa wakil rakyat; (2) Orientasi/Pelatihan Kader Desa Siaga yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota sesuai dengan pedoman; (3) Pengembangan Poskesdes dan UKBM yang dapat dikembangkan dari Poskesdes yang sudah ada.
  6. Penyelenggaraan kegiatan Desa Siaga Aktif: Dengan telah adanya Poskesdes, maka desa yang bersangkutan telah dapat ditetapkan sebagai Desa Siaga Aktif. Pos Kesehatan Desa adalah IKBM yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
  7. Pembinaan dan Peningkatan: Mengingat permasalahan kesehatan sangan dipengaruhi oleh kinerja sector lain, serta adanya keterbatasan sumber daya, maka untuk memajukan Desa Siaga Aktif perlu adanya pengembangan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam rangka pembinaan perlu dikembangkan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan para kader. Upaya-upaya pemeliharaan kelestarian kader ini melalui upaya motivasi kader berdasarkan kebutuhan-kebutuhannya.
     1. **Komponen Desa Siaga Aktif**

Dalam pembinaan dan pengembangan Desa Siaga Aktif terdapat 8 (delapan) komponen Desa Siaga Aktif yaitu sebagai berikut:

1. Adanya forum Kesehatan Desa.
2. Adanya sarana/fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Pos Kesehatan Desa/Poskesdes) dan system rujukannya.
3. Adanya UKBM yang dikembangkan.
4. Adanya system pengamatan penyakit dan faktor risiko berbasis masyarakat (*surveilans* berbasis masyarakat).
5. Adanya system kesiapsiagaan penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis masyarakat.
6. Adanya upaya menciptakan dan terwujudnya lingkungan yang sehat.
7. Adanya upaya menciptakan dan terwujudnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
8. Adanya upaya menciptakan dan terwujudnya Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi).
   * 1. **Indikator Keberhasilan Desa Siaga Aktif**

Keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan Desa Siaga Aktif di suatu Desa atau Kelurahan dapat dilihat dari pencapaian upaya-upaya yang dilakukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan serta Desa dan Kelurahan sebagai berikut:

* 1. Keberadaan dan keaktifan forum desa dan kelurahan
  2. Adanya kader Pemberdayaan Masyarakat atau kader kesehatan dan Kelurahan Siaga Aktif
  3. Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang buka atau memberikan pelayanan setiap hari.
  4. Keberadaan UKBM yang dapat melaksanakan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, survailans berbasis masyarakat serta penyehatan lingkungan
  5. Adanya pendanaan untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) atau anggaran kelurahan, masyaraat dan dunia usaha
  6. Adanya peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan kesehatan di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
  7. Adanya peraturan di desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur tentang pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
  8. Adanya pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga.